

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA PERIODE 2012- 1016

Assalamuallaikum wr, wb,

Sahabat-sahabat Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan, Pengurus Daerah serta anggota Ikatan Jurnalis Televisi di seluruh Indonesia. Hari ini, Sabtu, 21 Januari 2016, izinkan saya atas nama pengurus IJTI Pusat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan IJTI 2012-2016 di depan sahabat-sahabat semua.

Izinkan juga saya memberikan gambaran, perkembangan serta rekomendasi untuk kepengurusan selanjutnya. Saya yakin, hari ini adalah hari baik, di mana masa kepengurusan kami sudah berakhir pada Desember 2016 lalu.

Sahabat-sahabat keluarga besar IJTI yang saya cintai, Sebelum saya sampaikan secara detil laporan pertanggungjawaban ini, kami mohon maaf Kongres IJTI yang kami jadwalkan pada November terpaksa harus kami undur pada Januari 2017 ini. Perlu kami jelaskan keputusan mundurnya kongres ini disebabkan karena pelaksanaan pada bulan tersebut tidak memungkinkan kami gelar, karena terkait dengan agenda nasional dan situasi Jakarta yang tidak memungkinkan. Perlu kami sampaikan juga, pengunduran waktu tersebut dikoordinasikan antara Panitia Pelaksana, Pengurus Pusat serta seluruh Pengurus Daerah.

Namun demikian, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada panitia kongres yang telah bekerja keras untuk melaksanakan Kongres yang terwujud pada hari ini, Sabtu, 21 Januari 2017. Dengan segala keterbatasan, kongres ini kami harapkan menjadi ajang yang baik bagi kemajuan organisasi yang kita cintai ini. Kongres ini juga bisa menjadi ajang koreksi, perbaikan serta evaluasi menyeluruh untuk organisasi yang kita cintai.

Sahabat-sahabat keluarga besar IJTI yang saya cintai, IJTI periode 2012-1016 yang saya pimpin lahir pada saat organisasi ini sedang diperlukan untuk berperan dalam perkembangan media secara keseluruhan serta media penyiaran secara khusus. IJTI hadir sebagai salah satu organisasi profesi yang memiliki komitmen tinggi terhadap kebebasan pers, peningkatan

kapasitas profesi serta terwujudnya konten penyiaran yang berdampak baik bagi public.

Secara umum, kami sebagai pengurus organisasi, sejak terpilih pada Desember 2012 telah melakukan berbagai terobosan-terobosan penting untuk peningkatan kapasitas anggota, peran serta organisasi dalam dunia penyiaran serta profesi, juga berkerjasama dengan seluruh komponen pers di luar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.

Bidang Pengembangan Organisasi

Dalam perjalanan organisasi, IJTI yang lahir pada 1998 menjadi organisasi satu-satunya yang mewadahi aspirasi dan kepentingan jurnalis-jurnalis televisi. Pada 2012, di saat kepengurusan kami mulai bekerja, kami mencatat keanggotaan organisasi ini sekitar 500 orang, tersebar di beberapa provinsi dengan 19 kepengurusan daerah yang pada saat itu belum melakukan penyegaran organisasi.

Kami sadar betul, bidang organisasi ini menjadi ukuran penting pengaruh dan kinerja organisasi. Melalui kerja keras dan komitmen seluruh anggota IJTI di berbagai Provinsi kami melakukan ekspansi ke beberapa daerah, data base IJTI yang kami miliki mencatat, saat ini ada sekitar 1700 anggota IJTI yang resmi memiliki kartu anggota dan tersimpan dalam data base organisasi. 1700 keanggotaan IJTI tersebut terhimpun dalam 31 Kepengurusan Daerah serta 5 Koordinator Daerah. Hampir seluruh kepengurusan daerah dari ujung barat hingga ujung timur, dalam empat tahun terakhir ini melakukan penyegaran organisasi berupa pelaksanaan musyawarah daerah untuk memilih kepengurusan baru dan bekerjasama bahu membahu membangun organisasi di seluruh pelosok tanah air.

Sahabat-sahabat keluarga besar IJTI yang saya cintai, Berkembangnya sayap-sayap organisasi di berbagai daerah direspon positif. IJTI semakin kuat dengan dukungan seluruh pengurus daerah di tanah air. Saya pribadi, sebagai Ketua Umum mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus daerah yang sudah mengabdikan diri untuk berkembangnya IJTI.

Bidang Advokasi

Sebagai organisasi pers, IJTI selalu hadir dalam melakukan advokasi terhadap seluruh anggota nya terkait dengan aksi kekerasan terhadap pers. Tercatat selama empat tahun terakhir, kami melakukan proses advokasi terhadap 25 kasus pengaduan kekerasan terhadap pers. IJTI juga tergabung dalam satuan tugas anti kekerasan terhadap pers yang dibentuk bersama Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Proses advokasi yang dilakukan IJTI yang tergabung dalam Satgas anti kekerasan terhadap pers kami koordinasikan dengan seluruh instansi-instansi terkait, termasuk Kepolisian dan TNI.

Beberapa kasus yang menonjol yang kami tangani langsung, diantaranya, kasus pemukulan dan penganiayaan oleh TNI AU terhadap 4 orang jurnalis di medan saat meliput pengusuran. Kasus lainnya, IJTI melakukan advokasi terhadap jurnalis Poso yang diancam akan dibunuh karena pemberitaan. Dalam prosesnya, kami melakukan evakuasi dari Poso ke Palu untuk melakukan perlindungan. Secara umum kasus-kasus kekerasan terhadap pers terjadi di beberapa daerah dan IJTI berkerjasama dengan organisasi pers lainnya serta Dewan Pers melakukan proses advokasi.

Bidang Diklat dan Litbang

Bidang Pendidikan dan Pelatihan menjadi prioritas utama kami dalam menjalankan roda organisasi. Pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme jurnalis. Di tahun pertama kepengurusan IJTI (2013) rutin melakukan pelatihan mingguan atau weekly training yang diikuti oleh jurnalis-jurnalis muda, bertempat di Dewan Pers dan dipandu oleh jurnalis-jurnalis senior.

Pelatihan-pelatihan lain juga kami lakukan bekerjasama dengan berbagai lembaga. Untuk kerjasama IJTI dengan Dewan Pers; di berbagai daerah kami melakukan pelatihan-pelatihan jurnalistik yang dihadiri oleh sejumlah jurnalis dari daerah. Kerjasama pelatihan lainnya kami lakukan juga bekerjasama dengan berbagai lembaga, diantaranya; workshop jurnalistik Pertamina di 3 daerah, workshop jurnalistik dengan Sejuk (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman), workshop jurnalistik dengan LSM KPA (Agraria), workshop

jurnalistik dengan ECPAT tentang peliputan kekerasan anak, Pelatihan P3SPS bekerjasama dengan KPI serta media literasai bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (KemKominfo).

Bidang Sertifikasi dan Kompetensi

Sertifikasi dan Uji kompetensi menjadi instrument penting yang harus dijalankan organisasi, sejak disahkannya IJTI sebagai Lembaga Penguji oleh Dewan Pers pada 2012 lalu, kami secepatnya membuat *Training of Trainer* yang diikuti oleh jurnalis-jurnalis senior di seluruh station televisive. Buku Panduan Uji Kompetensi yang disahkan Dewan Pers kami perbaharui dan cetak ulang. Sampai saat ini sudah kami cetak sebanyak dua edisi, dengan total 1000 buah buku Uji Kompetensi.

Pelaksanaan Uji Kompetensi pertama kami lakukan di MNC Group sebagai pilot projek, selain diikuti oleh jurnalis-jurnalis senior MNC Group, pelaksanaan uji ini juga diikuti oleh jurnalis-jurnalis dari ANTV, SCTV dan Indosiar.

Selanjutnya, proses uji kompetensi dilakukan secara simultan di berbagai station televisi, masing-masing dilakukan di SCTV dua batch, NetTV satu batch, ANTV satu batch. Selanjutnya dalam waktu dekat IJTI akan melakukan uji kompetensi dua batch di TVONE dan dua batch di Transcorp. Untuk daerah, IJTI sudah melakukan uji kompetensi di Lahat, Sumatera Selatan pada 2015 lalu.

Hasil dari proses uji kompetensi, saat ini sudah adajurnalis utama,jurnalis madya danjurnalis muda. Sedangkan untuk penguji saat ini sudah mencapai 15 orang.

Ke depan, Uji Kompetensi menjadi perkejaan besar dari IJTI, 1700 orang anggota menjadi pekerjaan rumah tersendiri, saya yakin kepengurusan baru akan mampu menuntaskan dengan baik.

Sahabat-sahabat keluarga besar IJTI yang saya cintai, Saya mengulangi, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kami pengurus IJTI 2012-2016. Banyak hal yang kami lakukan, meskipun tidak sempurna, namun secara umum dengan segala keterbatasan waktu dan kemampuan pengurus, kami bisa menjalankan kinerja organisasi.

Di awal kepengurusan, kami menekankan kepada seluruh pengurus membuat program kerja yang bisa mengangkat citra IJTI semakin dikenal public. Selain

kiprahnya, peningkatan kapasitas profesi serta kegiatan dengan publikasi besar bisa membuat IJTI semakin dikenal sebagai wadah perkumpulan jurnalis-jurnalis televisi.

Selama tiga tahun berturut-turut, kami melakukan Konferensi Jurnalis Televisi Asia – Pacific. Konferensi pertama kami adakan pada Oktober 2013 bertempat di Surabaya dengan thema “Independensi Jurnalis Televisi” . Dapat kami laporkan juga konferensi ini diikuti oleh seluruh jurnalis televisi dari semua provinsi, seluruh stakeholder penyiaran dan juga jurnalis-jurnalis dari beberapa negara, antara lain; Malaysia, Timor Leste, Thailand, Filipina, dan India

Konferensi pertama kita kenal dengan konferensi yang melahirkan prakarsa Surabaya, adapun isinya sebagai berikut:

Prakarsa Nasional:

1. Jurnalis TV Indonesia bertekad menjaga netralitas dalam pemberitaan pemilu demi kepentingan public
2. Jurnalis TV Indonesia bertekad untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan segala perundangan serta peraturan dalam penyiaran
3. Jurnalis TV Indonesia bertekad untuk mengedepankan pemberitaan yang positif
4. Jurnalis TV Indonesia bertekad untuk senantiasa meningkatkan kompetensi yang merupakan tanggung jawab para jurnalis dan perusahaan yang menaunginya demi terciptanya pemberitaan yang lebih baik
5. Jurnalis TV Indonesia menuntut perusahaan TV bersikap adil dalam memperlakukan jurnalisnya tanpa membedakan status kepegawaiannya maupun hubungan kerjanya

Prakarsa Internasional

1. Jurnalis Televisi Asia memandang kebebasan jurnalistik adalah hak dan berkah yang harus dimanfaatkan bagi kemajuan bangsa dan alat menjaga perdamaian bangsa-bangsa.
2. Jurnalis Televisi Asia memaksimalkan kebebasan dengan penerapan jurnalistik positif dan sepenuhnya menentang segala bentuk penunggaran oleh kepentingan politik, ekonomi, dan industri.
3. Jurnalis Televisi Asia memandang perlu membentuk Forum Jurnalis Televisi Asia yang berkedudukan di ranah maya untuk mengembangkan saling pengertian antarjurnalis, peningkatan kompetensi, dan kebersamaan menjaga serta memanfaatkan kebebasan jurnalistik.

Selanjutnya, pada Oktober 2014 kami kembali mengadakan konferensi jurnalis televisi asia pacific, bertempat di Manado, Sulawesi Tengah. Pertemuan sejumlah jurnalis asia-pasific ini menyoroti kebebasan pers, independensi media serta menyongsong era digital dan pasar bebas.

Konferensi ini diikuti oleh sejumlah jurnalis dari beberapa negara, diantaranya; Indonesia, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Thailand, Timor Leste.

Konferensi ini merupakan tindak lanjut kegiatan serupa yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Surabaya, Jawa Timur. Sembilan negara di Asia Pasifik yang terlibat dalam konferensi sepakat mereview hasil Prakarsa Surabaya yang dituangkan kembali kedalam Prakarsa Manado. Para jurnalis televisi asia pasifik sepakat menjadikan Prakarsa Manado sebagai pegangan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya baik di nasional maupun internasional. Konferensi yang berlangsung 10 – 12 Oktober ini ditutup dengan penandatanganan bersama Prakarsa Manado yang terdiri dari 4 point Prakarsa Nasional dan 4 point Prakarsa Internasional :

Prakarsa Nasional:

1. IJTI akan menjalankan Prakarsa Surabaya
2. IJTI Bekerjasama dengan perusahaan pers berupaya meningkatkan kompetensi, dan profesionalisme
3. IJTI juga mendorong perusahaan pers meningkatkan kesejahteraan jurnalis
4. IJTI akan menggalang kerjasama dan solidaritas profesi jurnalis dalam menghadapi era digital dan pasar bebas.

Prakarsa Internasional

1. Jurnalis televisi Asia Pasifik bertekad untuk terus melanjutkan dan memperjuangkan prakarsa Surabaya
2. Jurnalis televisi Asia Pasifik memandang perkembangan teknologi informasi dan penyiaran sebagai sebuah keniscayaan yang harus di hadapi dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi
3. Dalam rangka mewujudkan dan menjaga kebebasan jurnalisti untuk kepentingan publik, jurnalis televisi Asia Pasifik bersepakat terus menjaga dan meningkatkan solidaritas profesi jurnalis.

4. Bersepakat membentuk kelompok kerja (working group) untuk menjadi cikal bakal Asosiasi Jurnalis Televisi Asia Pasifik. Asosiasi ini akan beranggotakan organisasi profesi jurnalis televisi dari Asia Pasifik

Dua kegiatan konferensi Asia Pacific kemudian kami lengkap pada tahun berikutnya. Bertempat di Palembang, Sumatera Selatan, IJTI kembali menggelar konferensi yang ke-3. Konferensi yang digelar pada 20 November 2015 ini menghasilkan Sembilan Komitmen Palembang.

'Sembilan Komitmen Palembang' berisi kesepakatan bersama jurnalis televisi di Asia Pasifik untuk menumbuhkan dan menjalankan jurnalisme positif. Melalui konferensi ini seluruh peserta baik dalam maupun dari mancanegara sepakat menerapkan jurnalisme positif untuk perdamaian dunia serta perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun 'Sembilan Komitmen Palembang' selengkapnya, sebagai berikut :

Kami Jurnalis Televisi berkomitmen :

1. Bekerja dengan tujuan mengungkapkan kebenaran bagi kepentingan manusia seluruhnya dengan pendekatan positif
2. Menjunjung tinggi kemanusiaan dan peradaban dengan mendorong pembangunan kehidupan manusia yang lebih baik melalui pemberitaan positif
3. Menyampaikan berita sesuai kaidah jurnalistik yang benar dan baik yang tercantum dalam kode etik
4. Dalam pemberitaan menghormati keberagaman sisi berita dan sudut pandang.
5. Berusaha menemukan solusi positif dari berbagai kondisi
6. Berusaha menonjolkan sisi positif dari berita negative
7. Santun dan terbuka dalam menyampaikan berita
8. Berkomitmen mencegah dan meniadakan segala bentuk kegiatan serta perilaku yang merendahkan harkat serta martabat pers
9. Mendorong semua pihak untuk terlibat dalam memberantas pers abal-abal

Sahabat-sahabat keluarga besar IJTI yang saya cintai,
Selain event-event besar yang saya sebutkan di atas, IJTI juga terlibat dalam proses menjaga kualitas pers secara keseluruhan, dengan berpedoman pada

kemerdekaan pers, kode etik, ketaatan terhadap regulasi dan menjaga komitmen pers untuk kepentingan public. Dalam point ini, banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Ikatan Jurnalis Televisi periode 2012-2016.

Dalam konteks hubungan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebagai partner, kami ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga tersebut. Kami juga melakukan interaksi dengan seluruh anggota KPI untuk ikut memberi masukan terhadap pengawasan konten-konten penyiaran bagi masyarakat.

Salah satu bentuk kontrol terhadap komisioner KPI, berupa penandatanganan "Pakta Integritas" pada 1 Juli 2013. Dengan Pakta Integritas tersebut, komitmen pimpinan KPI akan dunia penyiaran lebih baik bisa terpilihara. Bahkan, IJTI memelopori serta mendorong KPI untuk membentuk Dewan Kehormatan untuk mengusut salah satu anggotanya yang melakukan penyelewengan pada 2015 lalu. Peran serta IJTI sebagai organisasi profesi dalam dunia penyiaran kami anggap sebagai suatu keharusan dalam membentuk karakter organisasi yang kuat dan memiliki visi serta komitmen jelas.

Selain mekanisme kontrol dan kerjasama dengan regulator, IJTI juga melakukan peran serta secara langsung dalam menjaga konten penyiaran yang dianggap akan membahayakan public. Berbagai media literasi dan diskusi untuk mengambil kebijakan redaksional digelar IJTI, dengan melibatkan pimpinan media, regulator serta Dewan Pers dan masyarakat luas.

Dalam kasus kerusuhan Tolikara; pada saat kerusuhan terjadi, IJTI mengambil sikap tegas dengan memanfaatkan media social yang ada di twitter @ijti_id serta facebook, yang meminta awak redaksi untuk mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme positif dan mencegah masuknya visual atau quotation yang bisa menimbulkan konflik baru. Untuk membahas ini, IJTI juga melakukan diskusi pada 31 Juli 2015 di Dewan Pers.

Pada Akhir Agustus 2016, melalui diskusi dengan sejumlah pimpinan media, KPI serta Dewan Pers, IJTI merespon secara tegas terkait kasus persidangan "kopi sianida" Jesica Kumalawongso. IJTI memandang, lembaga penyiaran jangan hanya mementingkan kepentingan rating dan share belaka, namun nilai manfaat dari tayangan massif sidang secara live dilakukan harus diperhatikan.

Pada 10 November 2016, merespon adanya indikasi konflik sara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, IJTI mendorong semua media untuk meneguhkan komitmen untuk bersama-sama menjaga proses demokrasi secara

benar dan baik. Penandatanganan komitmen 10 November oleh para pimpinan media televisi RCTI, MetroTV, TV One, SCTV, Indosiar, InewsTV, Net TV, Berita Satu, Arah.com dan MNC Group, serta disaksikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Ketua KPI Yuliandre Darwis dan Ketua Dewan Pers serta Alian Jurnalis Independen (AJI). Adapun komitmen tersebut berisi:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman dengan mendorong pembangunan manusia yang lebih baik melalui pemberitaan yang positif
2. Senantiasa menyampaikan berita yang berimbang, obyektif, sesuai kode etik jurnalistik dan perundangan yang berlaku.
3. Tidak membuat berita yang akan mendorong terciptanya konflik SARA
4. Selalu menjaga produk pers yang kami buat supaya tidak berimplikasi negatif bagi masyarakat luas.
5. Mendorong semua pihak untuk membangun suasana yang kondusif untuk terciptanya rasa aman bagi masyarakat.
6. Menjunjung tinggi independensi, tidak partisan dan mencegah kegiatan serta perilaku yang merendahkan harkat dan matabat pers.

Untuk menindaklanjuti Komitmen 10 November, dalam kasus sidang Ahok IJTI kembali membuat acara Rembug Media pada Jumat, 9 Desember 2016 lalu Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia menginisiasi acara Curah Pendapat mengenai "Etika, Live Report Persidangan Kasus Ahok" yang akan berlangsung 13 Desember. Diskusi yang difasilitasi Dewan Pers, mengundang para pimpinan newsroom televisi, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia serta mantan Ketua Dewan Pers yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. Ada enam point yang menjadi catatan IJTI dalam rembug media ini, diantaranya:

1. Kebebasan pers menjadi tanggungjawab dan tugas semua pihak untuk menjalankannya, dan kami sepakat tidak ada lagi tawar menawar untuk hal tersebut.
2. Publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya.
3. Pers memiliki kewajiban untuk melindungi publik dari *bias* informasi, menyajikan content pers yg berdampak baik bagi publik, dan tidak membuat keresahan.
4. Dalam kasus persidangan Gub. Non aktif DKI, tidak dibenarkan media penyiaran melakukan "persidangan di luar sidang", menyajikan content yg bisa mempengaruhi keputusan majelis hakim, dan memprovokasi publik.

5. Wisdom menjadi utama dalam menyajikan content berita yang bertanggungjawab sesuai dengan etika jurnalistik, P3SPS dan perundangan yang berlaku.
6. Himbauan siaran langsung seperti edaran yang dilakukan KPI dan Dewan Pers, bukan pelarangan tapi kemasam yang mengutamakan kebutuhan dan perlindungan publik.

Khusus untuk poin nomor 6, tidak mudah bagi IJTI untuk melakukan release, karena pada waktu bersamaan, rebbug media ini kemudian banyak dituding justru akan membelenggu kebebasan pers. Namun, kami berhasil meyakinkan bahwa tanggungjawab media terhadap public, dan dampak akan informasi yang disebarkan menjadi titik utama pesan IJTI. Konten yang dibalut dengan keberimbangan, tanggungjawab serta visi baik untuk public akan memiliki makna dan justru diperlukan disaat kondisi informasi dikuasai oleh media social.

Dalam bentuk koreksi regulasi, pada April 2013, IJTI bersama dua organisasi Pers lainnya, AJI dan PWI mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatalkan Peraturan KPU yang membelenggu pers hingga akhirnya mereka menghapus aturan tersebut.

Berdasarkan keputusan bersama tiga organisasi wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta agar KPU Pusat membatalkan peraturan No. 1 tahun 2013 khususnya Pasal 45 dan 46. Kedua pasal tersebut secara prinsip bertentangan dengan UU Pers No. 40 tahun 1999 yang melarang segala bentuk pembredelan dan pelarangan pemberitaan.
2. Meminta agar KPU tidak menggunakan aturan-aturan hukum yang bertentangan dengan prinsip kebebasan pers dan kemerdekaan publik untuk mendapatkan informasi sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang dan Konstitusi UUD 1945.
3. Meminta KPU agar melakukan koordinasi dan meminta rekomendasi kepada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) apabila ingin menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan pers dan media penyiaran.
4. AJI, IJTI, PWI, menyerukan kepada jurnalis di seluruh Indonesia agar menaati kode etik jurnalistik (KEJ), pedoman perilaku penyiaran

(P3SPS), dan senantiasa mengedepankan profesionalisme, sikap independen, dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Untuk menjembatani komunikasi, IJTI memiliki web resmi www.ijti.org , kami juga hadir di twitter @ijti_id bersama account dari pengurus daerah, serta facebook. Kawan-kawan bisa menyaksikan kinerja IJTI secara keseluruhan di media social dan web IJTI.

Sahabat-sahabat keluarga besar IJTI yang saya cintai,
Pada akhirnya, di hari berbahagia ini saya ingin menyampaikan; pergulatan panjang IJTI selama empat tahun terkakhir menjelaskan secara gamblang peran serta IJTI dalam peningkatan kapasitas, profesionalisme serta komitmen organisasi dalam membangun dunia penyiaran. Kami menyentuh nilai-nilai organisasi, konten penyiaran, kritik regulasi serta perhatian untuk kepentingan public.

Untuk yang saya banggakan, para pengurus IJTI Pusat, saya ucapkan terimakasih tiada terhingga sudah ikut bekerja keras tanpa kenal lelah, berjibaku untuk perkembangan organisasi. Walaupun kawan-kawan semua sibuk dengan pekerjaan harian di media masing-masing, namun komitmen tak pernah pudar, hingga terwujudlah IJTI sebagai organisasi yang memiliki peran penting di dunia penyiaran.

Untuk sahabat-sahabat saya di daerah, para Ketua Pengurus Daerah di 31 provinsi dan 5 koordinator daerah, wujud cinta kalian terhadap organisasi menjadikan organisasi ini kembali bangkit mewarnai proses pendewasaan kita semua. Tanpa kawan-kawan di daerah tentu kami dari pengurus pusat bukanlah apa-apa. Saya mengenang saat-saat hadir di tengah-tengah kawan-kawan semua. Semangat dan sambutan hangat menjadi penyemangat saya untuk menjalankan amanah organisasi ini supaya bisa berguna bagi kita semua dan masyarakat.

Untuk para senior yang saya hormati, sungguh kritik, saran dari para senior adalah wujud cinta yang luar biasa. Tetaplah menjadi bagian yang membanggakan dari IJTI, saya bisa berdiri di sini karena wujud dari kepercayaan senior-senior semua. Jangan berhenti untuk mengingatkan, memberi masukan dan mendampingi organisasi.

Akhir kata, empat tahun terakhir akan menjadi gambaran IJTI ke depan. Hidup, hiduplah IJTI dan jangan mencari hidup dari IJTI.

Secara pribadi, saya dan seluruh pengurus IJTI periode 2012-2016 meminta maaf jika selama kepengurusan kami banyak kekurangan bahkan dianggap tidak sesuai dengan harapan kawan-kawan semua.

Salam hangat dari kami,

Terimakasih

Wassalamuallaikum wr.wb.